

Praktik pekerjaan sosial khususnya di lingkungan Islam, penting mempunyai kiblat yang relevan dengan lingkungannya. Sebagai ilmu yang lahir dan berkembang di luar tradisi Islam, pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial selama ini berkiblat pada tradisi budaya dan keilmuan di Barat. Buku berjudul *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus* ini tidak lain adalah bagian dari upaya untuk mempertegas kiblat kesejahteraan sosial, yakni dalam konteks keislaman. Karena buku ini secara gamblang menunjukkan bahwa ada interkoneksi antara Islam dan kesejahteraan sosial.

Menghubungkan sebuah entitas keilmuan yang sudah mapan dengan tradisi Islam di beberapa kalangan memang memunculkan kecurigaan epistemologis. Seperti halnya upaya menginterkoneksi Islam dan kesejahteraan sosial seolah bagian dari gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Sehingga, ilmu kesejahteraan sosial seakan-akan ingin dilegitimasi dalam konteks keislaman. Kuntowijoyo, seorang ilmuwan yang sohor pernah mengkritik gerakan Islamisasi pengetahuan karena ilmu yang bersangkutan tidak memiliki landasan paradigma yang kuat. Karena itulah beliau membalikkan logika gerakan tersebut dengan “pengilmuan Islam.” Yang pertama dapat terjebak pada legitimasi-legitimasi yang hanya menyentuh kulit luar sedangkan yang kedua berupaya membangun landasan paradigmanya.

Tentu saja buku ini tidak ingin terjebak pada yang pertama dengan hanya melegitimasi teori-teori atau praktik pekerjaan sosial dalam tradisi keilmuan Islam. Namun lebih dari itu, yakni dengan menunjukkan secara epistemologis adanya interkoneksi Islam dan kesejahteraan sosial. Karena itulah buku ini tidak hanya menyuguhkan ulasan kepada pembaca pada dataran teoritis, akan tetapi juga masuk dalam wilayah pendekatan (strategi) hingga studi kasus (praktik). Di sinilah nantinya, ilmu kesejahteraan sosial dapat menemukan wujudnya sebagai ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan tradisi Islam.

 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bekerjasama dengan:

 **Penerbit Samudra Biru**
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

ISBN 978-602-9276-18-3



9 786029 276183

Waryono Abdul Ghafur, Dkk.

INTERKONEKSI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL



INTERKONEKSI

ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus

**Waryono Abdul Ghafur
Andayani - Zainudin
Arif Maftuhin - Abidah Muflihati
M. Izzul Haq - Noorkamilah
Suisyanto - Siti Solechah
M. Nazili - M. Ulil Absor**

**Editor:
Miftachul Huda
Astri Hanjarwati**



**INTERKONEKSI ISLAM
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL:
Teori, Pendekatan dan Studi Kasus**

Penulis:

Waryono Abdul Ghafur

Andayani - Zainudin

Aryan Torrido - Arif Maftuhin

Abidah Muflihati - M. Izzul Haq

Noorkamilah - Suisyanto

Asep Jahidin - Siti Solechah

M. Nazili - M. Ulil Absor



INTERKONEKSI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL:

Teori, Pendekatan dan Studi Kasus

-Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Samudra Biru,
Cetakan I, Desember 2012
x + 288 hlm, 15.5 x 23 cm

Penulis : Waryono Abdul Ghafur, dkk.
Editor : Miftachul Huda dan Astri Hanjarwati
Desain Sampul : Muttakhidul Fahmi
Tata Letak : Maryono Ahmad

Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan:

Penerbit Samudra Biru
Jomblangan, Gg. Ontosesno No. B 15 Rt 12/30
Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta
Email/fb: psambiru@gmail.com
Phone: (0274) 9494558

ISBN: 978-602-9276-18-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN I	
INTERKONEKSI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
DALAM PERSPEKTIF KEILMUAN	1
BAB I Tafsir Kesejahteraan Sosial (<i>Al-‘Adlul Ijtima’i/Sosial Welfare</i>) dan Strategi Mewujudkan Kesejahteraan dalam Al-Qur’an	
Waryono Abdul Ghafur	3
BAB II Konstruksi Teoritik Interkoneksi Spiritualitas dan Pekerjaan Sosial	
Andayani	33
BAB III Kesejahteraan Sosial dalam Hadis	
Zainudin	53
BAB IV Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan dan Peran Dakwah	
Aryan Torrido	67

BAB V Merumuskan Fiqih Kesejahteraan Sosial: Studi atas Pemikiran Sahal Mahfudh dan Jasser Auda Arif Maftuhin	87
BAGIAN II	
STRATEGI/ PENDAMPINGAN PEKERJAAN SOSIAL BERBASIS ISLAM	107
BAB VI Metode Intervensi Mikro dalam Islam Abidah Muflihati	109
BAB VII Legitimasi Normatif Intervensi Makro dalam Islam M. Izzul Haq	131
BAB VIII Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Praktik Pekerjaan Sosial Noorkamilah	147
BAB IX Strategi Dakwah Perspektif Pendampingan Masyarakat Suisyanto	177
BAGIAN III	
STUDI KASUS INTERVENSI PEKERJAAN SOSIAL BERBASIS ISLAM	203
BAB X Pondok Pesantren dan Kesejahteraan Sosial Anak di Persimpangan Jalan: Antara Peran Mengasuh dan Mendidik Asep Jahidin	205
BAB XI Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Islam di Pondok Inabah 13 Yogyakarta Siti Solechah	215
BAB XII Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid M. Nazili	239

BAB XIII Penanggulangan Perburuhan Anak Melalui Pesantren: Model, Potensi dan Peluang	
M. Ulil Absor	259
BIODATA PENULIS	283

BAB XIII

Penanggulangan Perburuhan Anak Melalui Pesantren: Model, Potensi dan Peluang

M. Ulil Absor

A. Pendahuluan

Fenomena perburuhan anak menjadi perhatian publik baik di tingkat internasional maupun lokal beberapa dekade ini. Hal ini disebabkan karena angka perburuhan anak sangat tinggi bahkan cenderung meningkat. International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah anak yang bekerja pada tahun 1997 adalah 250 juta¹ dan meningkat menjadi 318 juta anak dan 218 juta diantaranya adalah pekerja anak pada tahun 2004.² Sedangkan Survey Pekerja Anak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2009 menemukan bahwa di Indonesia terdapat 4,06 juta anak yang bekerja dan 1,76 juta diantaranya adalah pekerja anak. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional Indonesia (Susenas), jumlah anak yang bekerja pada tahun 2004 adalah 1,5 juta anak-anak dan 1,4 juta diantaranya adalah pekerja anak.³

Anak-anak tersebut sangat rentan untuk dieksploitasi dan menjadi korban kekerasan. Anak jalanan misalnya adalah salah satu

¹ Inter-Parliamentary Union & ILO, *Eliminating The Worst Forms Of Child Labour: A Practical Guide To ILO Convention No. 182: Handbook For Parliamentarians*, (Switzerland: International Labour Office, 2002), hlm. 24.

² BPS & ILO, *Working Children In Indonesia*, Cat. No. 2306003, Jakarta: BPS & ILO, 2009, hlm: 4

³ *Ibid.*, hlm:xi

jenis pekerja anak yang sangat rentan menjadi korban penindasan (*oppression*) seperti pelecehan, eksploitasi, pengekangan oleh preman, korban tabrak lari, jatuh ke lobang galian, terkena polusi udara dan terlibat dengan perdagangan narkoba.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh ILO dan ARTI (Institut Pelatihan dan Penelitian Aksi) pada tahun 2004 menemukan 133 dari 255 anak jalanan mengkonsumsi narkoba dan alkohol termasuk menghisap lem di Jakarta Timur. Temuan ini dikuatkan lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat, Universitas Atma Jaya pada tahun 2005 yang menemukan 464 dari 500 anak jalanan adalah pemakai narkoba.⁵

Untuk mengatasi masalah tersebut, banyak upaya telah dilakukan oleh stakeholder pekerja anak khususnya pemerintah Indonesia, Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional, Perguruan Tinggi dan masyarakat. Pemerintah Indonesia misalnya melakukan layanan tidak langsung (*indirect services*) seperti penguatan kebijakan, penguatan kapasitas dan peningkatan kesadaran; dan layanan langsung (*direct services*) kepada pekerja anak seperti pendidikan formal dan informal serta pelatihan keterampilan.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah bekerjasama dengan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN BPTA) Tahap II (2008-2012) misalnya, pemerintah Indonesia bermitra dengan pesantren-pesantren. Pesantren Darul Muhajirin dan An-nuroniyyah Di Kota Bogor⁶, Pondok Pesantren Kepuhdoko Kabupaten Jombang⁷ dll adalah diantara mitra pemerintah Indonesia dalam menarik pekerja anak dari dunia kerjanya. Para pekerja anak tersebut ditempatkan di pesantren untuk menyiapkan mereka kembali ke sekolah formal, non-formal atau pelatihan keterampilan. Strategi serupa juga dilaksanakan oleh ILO melalui International Program on The Elimination Of Child

⁴ ILO-IPEC, *Katalog tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia*, Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2001, hlm: 7

⁵ ILO-IPEC & Pusat Penelitian Sosial dan Pembangunan, Universitas Atmajaya, *Pemetaan keterlibatan anak dalam Perdagangan Narkoba di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat*, 2005

⁶ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=95270>, diakses tanggal 25 Oktober 2012

⁷ <http://dprd.jatimprov.go.id/index.php?limitstart=27>, diakses tanggal 25 Oktober 2012

Labour (IPEC). Pesantren Madinatul Ulum dan al-Falah di Kabupaten Jember misalnya adalah dua pesantren yang menjadi mitra ILO-IPEC dalam menghapus perburuhan anak.

Pelibatan pesantren dalam penanganan perburuhan anak tersebut menunjukkan bahwasanya pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan islam yang sering sekali dikenal sebagai lembaga yang lebih banyak mengurus urusan ukhrowiyah bahkan dicap sebagai pusat radikalisme sebagai dampak dari tragedi bom Bali, ternyata mempunyai kontribusi yang besar dalam penanganan masalah-masalah sosial khususnya dalam pengentasan perburuhan anak di Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi mengapa pesantren menjadi lembaga yang sangat strategis dalam pengentasan perburuhan anak dan bagaimana model penanggulangan perburuhan anak yang dilakukan oleh pesantren. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu konsep pekerja anak dan anak yang bekerja dan strategi utama yang dilakukan dalam pengentasan perburuhan anak sehingga model pengentasan perburuhan anak melalui pesantren dapat terpetakan.

B. Pekerja Anak (*Child Labourer*) dan Anak yang Bekerja (*Child Worker*)

Pekerja anak (*child labourer*) dibedakan dengan anak yang bekerja (*child worker*). Anak yang bekerja adalah seorang individu yang berada di bawah usia 18 tahun yang aktif secara ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup semua pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, baik di sektor formal maupun informal termasuk melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah tangga orang lain. Namun, anak-anak yang melakukan tugas-tugas rumah di rumahnya sendiri tidak dianggap aktif secara ekonomi.⁸ Pekerja anak (*child labourer*) adalah bagian dari anak yang bekerja (*child worker*) di mana pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut mengganggu pendidikan dan membahayakan kesehatan, keselamatan dan keberlangsungan hidup anak tersebut.⁹

Definisi ini sangat umum sehingga para ahli ketenagakerjaan

⁸ International Labour Organization, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan Penerima Manfaat Langsung*, Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2008, hlm, 3-6.

⁹ BPS & ILO, *working children....* hal: xi, ILO, Nellen Haspels & Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan Dan Anak: Panduan Praktis Bagi Organisasi*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005, hlm. 10.

menetapkan beberapa parameter untuk mengukur tingkat kerentanan anak sebagai kategori pekerja anak seperti umur, jam kerja, lingkungan kerja, jenis dan cara melakukan pekerjaan. Dari sisi umur dan jam kerja, Undang-Undang no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 mengenai Batasan Usia Minimum untuk Bekerja menetapkan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun dan membolehkan pekerjaan ringan untuk anak berusia 13-14 tahun dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Ijin tertulis dari orangtua atau wali anak tersebut;
2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
3. Waktu kerja maksimum 3 jam;
4. Dilakukan pada siang hari, dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Keselamatan dan kesehatan kerja;
6. Hubungan kerja yang jelas; dan
7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh bekerja dalam kondisi apapun.¹⁰ Jadi anak-anak yang berusia 15-17 tahun diperbolehkan bekerja karena mereka telah mencapai atau melebihi usia minimum secara umum. Namun jika mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya karena sifat dan kondisinya, maka mereka termasuk pekerja anak dan perlu segera dihapus.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235/2003 juga menjelaskan lebih rinci tentang sifat kondisi lingkungan kerja yang tidak boleh melibatkan anak yang meliputi:

1. Pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan, meliputi pekerjaan yang membutuhkan mesin, instalasi dan peralatan berbahaya termasuk pekerjaan produksi, perakitan, instalasi, operasional dan memperbaiki alat.
2. Pekerjaan yang dapat merusak moral anak, meliputi pekerjaan di bar atau pusat hiburan yang dapat berujung ke prostitusi.

Dari sisi jenis pekerjaan, Keputusan Presiden 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) menjelaskan 13 bidang/jenis pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai pekerja anak bahkan BPTA, antara lain:

¹⁰ International Labour Organization, *Panduan....*hlm. 4

1. Anak yang dilacurkan;
2. Anak yang bekerja di pertambangan;
3. Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
4. Anak yang bekerja di sektor konstruksi;
5. Anak yang bekerja di jermal atau lepas pantai;
6. Anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
7. Anak-anak yang dilibatkan anak dalam produksi alat atau bahan peledak;
8. Anak yang bekerja di jalan;
9. Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
10. Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
11. Anak yang bekerja di perkebunan,
12. Anak yang bekerja pada kegiatan penebangan pohon dan produksi kayu olahan;
13. Anak yang bekerja pada industri dannjenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pekerja anak meliputi anak usia dibawah 12 tahun, anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 3 jam sehari dan anak usia 15 - 17 tahun yang bekerja di jenis pekerjaan yang berbahaya seperti di jalan. Kategori pekerja anak seperti inilah yang dilarang oleh undang-undang. Jadi anak yang bekerja lebih luas dari pekerja anak dimana pekerja anak adalah istilah untuk kelompok anak yang bekerja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

C. Strategi Penanganan Pekerja Anak

Permasalahan perburuhan anak tidak dapat diatasi dengan satu pendekatan karena sangat terkait dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu penanganan yang dilakukan harus menggunakan pendekatan yang holistic dan integratif yang mencakup pencegahan, penarikan dan perlindungan.

Secara umum ada tiga strategi yang dilakukan dalam melakukan penanganan perburuhan anak yaitu:¹¹

1. Pencegahan Perburuhan Anak (*Prevention*)

Pencegahan perburuhan anak adalah kegiatan-kegiatan atau program-program yang dapat mencegah anak yang berisiko

¹¹ International Labour Organization, *Tackling Hazardous Child Labour In Agriculture: Guidance On Policy And Practice Background Policy Information*, (Turin: The International Training Center of the ILO, 2006), hlm. 5-8.

menjadi pekerja anak memasuki dunia kerja. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kerentanan anak menjadi pekerja seperti:¹²

- a. Anak-anak yang tinggal di atau di dekat areal perkebunan (rentan menjadi pekerja anak di perkebunan)
- b. Kakak/adik dari pekerja anak di perkebunan (rentan menjadi pekerja anak di perkebunan);
- c. Kakak/adik dari pekerja rumah tangga anak (rentan menjadi pekerja rumah tangga anak)
- d. Kakak/adik dari pekerja migran (rentan menjadi korban perdagangan orang)
- e. Prestasi rendah di sekolah;
- f. Sering tidak masuk sekolah;
- g. Anak tinggal jauh dari sekolah;
- h. Dari rumah tangga dengan orangtua tunggal;
- i. Anak-anak putus sekolah dan belum mengikuti program pendidikan;
- j. Tidak punya akte lahir;
- k. Anak-anak dari kalangan keluarga miskin.

Strategi pencegahan mencakup kegiatan jangka panjang yang menjawab akar masalah dari penyebab munculnya perburuhan anak seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan bahaya narkoba dan terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Adapun kegiatan dan program yang dapat dilakukan untuk mencegah perburuhan anak adalah antara lain:

- a. Pemberdayaan ekonomi keluarga
- b. Pendidikan remedy untuk siswa/siswi yang mempunyai nilai dibawah standar ketuntasan minimal
- c. Kampanye tentang pentingnya pendidikan dan bahayanya pekerja anak
- d. Pendidikan non-formal dan formal
- e. Pendidikan keterampilan hidup dll.

2. Penarikan Pekerja Anak (*Withdrawal*).

Strategi penarikan pekerja anak adalah upaya-upaya merehabilitasi pekerja anak dengan menarik mereka dari dunia kerjanya sehingga mereka tidak bekerja lagi dalam pekerjaan tersebut. Strategi penarikan

¹² International Labour Organization, *Panduan...*hlm. 23-24.

dilakukan terhadap pekerja anak yang ada dalam beberapa kondisi di antaranya adalah:

- a. Mengerjakan pekerjaan yang berbahaya meskipun sudah berumur 15 tahun.
- b. Pekerja anak yang berada dibawah umur 15 tahun yang tidak melakukan pekerjaan ringan.
- c. Pekerja anak yang berusia dibawah 12 tahun meskipun mengerjakan pekerjaan ringan.¹³

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menarik pekerja anak dari dunia kerjanya adalah:

- 1) Advokasi
- 2) Pendidikan non-formal dan formal
- 3) Pelatihan keterampilan
- 4) Magang
- 5) Pendidikan kecakapan hidup
- 6) Bridging course (pendidikan antara)
- 7) Pelatihan kewirausahaan, dll.

3. Perlindungan Pekerja Anak (*Protection*).

Pendekatan perlindungan adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan perlindungan terhadap pekerja anak yang dibolehkan untuk bekerja yaitu untuk pekerja anak yang berusia 13-14 tahun untuk pekerjaan ringan dan untuk pekerja anak yang berusia 15-17 tahun. Strategi perlindungan bertujuan untuk melindungi dan mencegah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak terhadap kesehatan dan keselamatannya.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melakukan program perlindungan pekerja anak antara lain adalah:

- a. Pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja
- b. Advokasi kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja
- c. Memberikan bantuan perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja dll.

D. Potensi Pesantren dalam Penghapusan Perburuhan Anak

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari segala macam bentuk penindasan

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

(*oppression*), eksploitasi, marginalisasi dan diskriminasi. Islam adalah jawaban dan solusi dari setiap masalah sosial seperti kemiskinan, perburuhan anak, perdagangan orang dll. Lembaga zis (zakat, infaq, sedekah) dan pesantren adalah dua diantara lembaga-lembaga islam (*islamic institutions*) yang berperan sangat besar dalam menjawab masalah-masalah sosial. Lembaga-lembaga zis baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta tidak hanya menggunakan pendekatan karitatif dalam pendistribusian zakat, namun memprioritaskan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Begitu juga halnya dengan pesantren. Pesantren bukan hanya lembaga dakwah dan pendidikan namun juga lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, pesantren berperan besar dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Menurut Open dan Karcher seperti dikutip oleh Zubaedi (2007), ada 4 argumen utama mengapa pesantren dapat berperan sebagai bagian dari solusi penanganan masalah sosial yaitu potensi penyadaran masyarakat, lembaga pendidikan, menggerakkan partisipasi masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dan pelopor problem solver.¹⁴

1. Pesantren dan *Awareness Raising* (Penyadaran Masyarakat)

Sebagai lembaga dakwah pesantren mempunyai potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya pembebasan dan penyadaran masyarakat khususnya masyarakat tertindas (du'afa) dengan memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran akan kondisi ketertindasan mereka sehingga mereka dapat berdaya menolong diri mereka sendiri keluar dari ketertindasan tersebut. Dalam konteks penghapusan pekerja anak, potensi ini sangat strategis dan relevan mengingat salah satu faktor utama munculnya perburuhan anak adalah faktor budaya dan kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang bahayanya perburuhan anak. Banyak orang tua yang lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Ketika anak perempuan tidak sekolah mereka cenderung bekerja bahkan menikah dalam usia dini. Kondisi ini menjadikan anak perempuan sangat rentan menjadi korban perdagangan anak.¹⁵

Data dari UNICEF menunjukkan bahwasanya terdapat

¹⁴ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqh Sosial Kāi Sahal Mahjudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 18-19.

¹⁵ Inter-Parliamentary Union & ILO, *Eliminating The Worst.....*hlm. 25.

perbedaan angka partisipasi sekolah diantara anak laki-laki dan perempuan. Angka partisipasi sekolah anak laki-laki usia 7-12 tahun adalah 85% sedangkan anak perempuan berjumlah 83%. Perbedaan tersebut semakin tinggi dengan semakin bertambahnya usia seperti angka partisipasi pendidikan anak laki-laki yang berusia 16-18 tahun adalah 25% sedangkan anak perempuan adalah 10%.¹⁶

Di samping itu, banyak orang tua yang kurang menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak mereka dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak mereka. Anak-anak yang bekerja di jalan misalnya beresiko terpapar polusi udara, tertabrak mobil dan terlibat narkoba sangat tinggi. Menyiapkan makanan,¹⁷ mengepel lantai¹⁸, mencuci pakaian,¹⁹ membersihkan dapur dan peralatan rumah tangga dll adalah tugas yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga anak (PRTA) dimana tugas tersebut berbahaya untuk anak-anak. Mengaduk, mengisi dan menyemprot pestisida,²⁰ menggunakan

¹⁶ ILO, *Program Terikat Waktu Indonesia tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)*, Jakarta: kantor ILO Jakarta, 2008, hlm: 11

¹⁷ Terdapat 40 tugas yang dilakukan oleh PRTA terkait dengan menyiapkan makanan seperti menggunakan peralatan dapur yang tajam untuk memotong daging dan sayuran, menjerang dan menyalakan kompor, memasak dengan minyak yang bisa menyiprat dan meledak serta juga bekerja di sekitar oven dan panci yang panas dan bahkan di lingkungan yang berasap. Lihat ILO, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan....*hlm. 8.

¹⁸ Biasanya PRTA harus membungkuk dan merangkak dalam beberapa jam setiap hari untuk menyapu dan mengepel lantai terutama di negara-negara yang memiliki sapu dengan tangkai yang pendek. Anak-anak ini juga harus bekerja dalam waktu yang panjang dengan lutut mereka tanpa istirahat yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya cedera ergonomik yang serius. Lihat ILO, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan....* hlm. 8.

¹⁹ Kegiatan ini melibatkan suatu rangkaian tugas seperti mengangkat pakaian yang berat dari tempat penyimpanan ke tempat cucian. Wilayah untuk mencuci ini sangat beragam seperti kamar mandi, teras, tempat pencucian umum, atau sungai dan danau. Dalam beberapa kasus, pakaian harus dicuci oleh layanan cuci eksternal. Pakaian biasanya digosok menggunakan tangan untuk waktu yang panjang dengan menggunakan bubuk pencuci dari bahan kimia yang berpotensi berbahaya. Lihat ILO, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan....*hlm. 8.

²⁰ Sebagian dari pestisida sangat beracun dan dapat menimbulkan kanker, sedangkan pestisida lain dapat mengganggu fungsi otak, perilaku dan kesehatan mental, atau dapat mengganggu reproduksi laki-laki dan perempuan di kemudian hari. Kurangnya sarana penyimpanan pestisida yang memadai atau sistem pembuangan wadah pestisida yang sudah kosong dapat mengakibatkan anak-anak keracunan atau bahkan dapat menimbulkan kematian apabila wadah-wadah tersebut digunakan untuk tujuan lain. Lihat ILO, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan....*hlm. 13.

mesin dan alat pertanian,²¹ menggunakan alat potong yang tajam,²² memanen atau menyimpan hasil panen,²³ mempersiapkan makanan untuk hewan ternak, dan menyapu tempat kerja²⁴ adalah contoh tugas-tugas yang dilakukan oleh pekerja anak di sektor pertanian. Tugas-tugas tersebut sangat berisiko dan membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. Resiko dan bahaya dari kegiatan-kegiatan tersebut banyak yang kurang disadari oleh orang tua sehingga sering sekali orang tua melibatkan anak-anak mereka untuk membantu perekonomian keluarga.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran (*awareness raising*) terkait dengan risiko dan bahaya pekerja anak menjadi salah satu strategi utama dalam upaya penghapusan perburuhan anak. Pemerintah Indonesia misalnya, melalui Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA) yang menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan (Pemerintah, LSM, masyarakat, orang tua, Perguruan Tinggi, media massa dll) dalam melaksanakan upaya-upaya nyata dalam penghapusan perburuhan anak menjadikan peningkatan kesadaran sebagai strategi utama.²⁵ Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Komite Aksi Nasional

²¹ Ini mencakup pengoperasian mesin dan perlengkapan yang sangat kuat seperti traktor. Pengoperasian alat-lat berat tersebut mempunyai resiko misalnya traktor terbalik, atau ditabrak traktor/trailer/truk, dan kereta berat yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian; naik turun trailer atau mesin-mesin lain yang masih bergerak, tergelincir atau terlepas dari pijakan, atau jatuh ke bawah mesin-mesin tersebut sehingga hancur atau terlindas. Lihat ILO, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan...*hlm. 13.

²² Benda tajam yang sering digunakan pekerja anak di pertanian adalah antara lain parang, pisau, sabit besar, arit, dll. untuk memotong hasil panen, jerami, rumput liar, dan semak belukar. Alat potong ini sering menimbulkan luka atau bahkan cedera yang lebih serius, seperti amputasi dan tetanus. Disamping itu, gerakan bertenaga yang dilakukan secara berulang-ulang sewaktu memotong juga dapat mengganggu pertumbuhan kerangka otot pekerja anak. Lihat ILO, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan...*hlm. 8.

²³ Banyak hasil panen yang dipetik anak-anak bersifat abrasif, berduri atau mengandung iritasi kulit yang dapat menimbulkan alergi, ruam, lepuh, dll.

²⁴ Menghirup debu organik dapat mengakibatkan alergi, penyakit pernafasan, seperti asma yang berhubungan dengan pekerjaan dan *alveolitis* alergi ekstrinsik (terlalu sensitif pada debu, pneumonia – radang paru). Mengumpulkan, menggembala, dan memberi susu pada hewan ternak dapat mengandung risiko dan anak sering cidera akibat terdesak, terdorong, atau terinjak hewan ternak. Bekerja tanpa menggunakan alas kaki di ladang atau di sekitar hewan ternak juga dapat menimbulkan luka sayat, luka memar, tertusuk duri, gangguan pada kulit, atau bahkan terkena penyakit yang dibawa melalui air, terutama jika kondisi tanah sedang basah dan lengket.

²⁵ Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak:*

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBTA)²⁶ dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan semua pemangku kepentingan pekerja anak tentang risiko dan bahaya pekerja anak diantaranya adalah penyebaran brosur, leaflet, poster dan bulletin tentang perlindungan pekerja anak, pembuatan film pekerja anak (di sektor alas kaki dan di jermal), seminar, lokakarya, dialog publik, talk show dll.²⁷

Pendekatan serupa juga dilakukan oleh lembaga non pemerintah baik lokal maupun internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Yayasan Paramitra Malang bekerjasama dengan pesantren Madinatul Ulum di Kabupaten Jember.²⁸ Banyak kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan bahayanya perburuhan anak seperti melakukan pertemuan rutin dengan orang tua, pelatihan tentang hak anak dan kesehatan dan keselamatan kerja anak untuk pemerintah dan pengelola perkebunan dan memanfaatkan pengajian rutin di tingkat masyarakat untuk menyelipkan materi tentang peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan larangan mempekerjakan anak.²⁹

Kegiatan peningkatan kesadaran ini sangat tergantung dengan metode, media dan pelaksana kegiatan karena kegiatan ini bertujuan untuk merubah perilaku individu maupun komunitas. Pesantren diyakini mempunyai potensi dan kekuatan yang sangat besar dalam membentuk dan mengubah struktur sosial dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pesantren bukan hanya lembaga dakwah dan pendidikan namun juga lembaga sosial yang berperan sebagai agen

Periode 2002-2007, (Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2008), hal. 2

²⁶ KAN-PBPTA adalah lembaga bentukan pemerintah yang bersifat lintas sektoral yang terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi pengusaha, Serikat Buruh/Pekerja, LSM, Media dan Perguruan Tinggi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program penghapusan perburuhan anak di Indonesia. Lembaga ini terstruktur dari tingkat pusat sampai daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota). KAN-PBPTA dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Sedangkan di daerah lembaga ini dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur dan Bupati atau Walikota.

²⁷ KAN-PBPTA, *Laporan.....*, hlm. 23

²⁸ Irwanto dkk, *Alternative Education For Disadvantaged Youth In Indonesia*, Paris: UNESCO, 2001, hlm. 79

²⁹ Nazili M & M. Ulil Absor, *Model Penghapusan Pekerja Anak Di Perkebunan Melalui Layanan Pendidikan Di Pesantren Madinatul Ulum Kabupaten Jember Jawa Timur*, (Yogyakarta: laporan penelitian tidak diterbitkan, 2010), hlm. 88-89

perubahan menuju kehidupan yang lebih baik.

Sebagai agen perubahan, figur kiai dan ustad sangat penting dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran. Sebagai tokoh yang dihormati di masyarakat, kiai mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya-upaya transformasi sosial karena pemikiran dan pendapat mereka diikuti oleh masyarakat. Jalaluddin Rakhmad mencatat bahwa proses transformasi sosial dalam sejarah banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar.³⁰ Figur kiai sebagai tokoh yang dihormati dalam masyarakat menjadikan mereka menjadi tokoh atau pemimpin yang ditaati bukan hanya oleh santri namun oleh masyarakat dimana kiai itu tinggal. Dalam konteks penyadaran masyarakat, kiai dan pesantrennya menjadi peluang yang sangat strategis dalam upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan bahayanya perburuhan anak. Berdasarkan argumen inilah maka upaya-upaya penghapusan perburuhan anak banyak melibatkan pesantren sebagai ujung tombak menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan bahayanya pekerja anak.

2. Pesantren dan Pendidikan

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang bukan hanya memberikan pendidikan agama (*diniyyah*) namun juga pendidikan formal. Jumlah pesantren yang lebih dari 7000 pesantren yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia menjadi potensi yang sangat luar biasa dalam upaya penghapusan perburuhan anak mengingat strategi utama penghapusan pekerja anak adalah melalui layanan pendidikan.³¹ Strategi pendidikan menjadi sangat relevan karena disamping berbahaya untuk kesehatan dan keselamatan anak, alasan lain pelarangannya adalah karena pekerjaan yang mereka lakukan mengganggu pendidikan mereka sehingga dikhawatirkan akan merusak masa depan mereka.³²

Strategi pendidikan dianggap efektif karena dengan sekolah, anak-anak akan tercegah untuk memasuki dunia kerja. Ada banyak penelitian yang mengkaji hubungan antar pekerja anak dan pendidikan. Penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh 3 lembaga internasional

³⁰ Jalaluddin Rakhmad, *Rekayasa Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 1999), hlm. 48.

³¹ Lansky Mark, Perspective, Child Labour: How the Challenge Is Being Met, *International Labour Review*; Summer 1997; 136, 2, diakses tanggal 6 September 2012 dari Proquest Research Library, hlm. 234.

³² Inter-Parliamentary Union & ILO, *Eliminating The Worst* hlm. 15.

yaitu ILO, UNICEF dan Bank Dunia misalnya, menemukan bahwa di negara-negara yang angka pekerja anaknya tinggi terdapat angka putus sekolah yang tinggi juga. Ketika anak putus sekolah mereka cenderung memasuki dunia kerja dan kondisi ini menjadikan mereka kelompok yang paling rentan untuk dieksploitasi.³³ Penelitian lain yang mengkaji korelasi antara anak yang bekerja dengan tingkat kehadiran di sekolah antara lain adalah penelitian yang dilakukan di yang Kamboja menemukan bahwasanya anak yang bekerja cenderung berdampak negatif terhadap kehadiran siswa. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat kelulusan siswa. Rendahnya tingkat kelulusan banyak dipengaruhi oleh factor ekonomi. Siswa yang berasal dari keluarga miskin dituntut untuk bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Oleh karena itu strategi pendidikan dengan memfasilitasi pendidikan formal maupun non-formal adalah salah satu strategi yang paling efektif untuk menghapuskan perburuhan anak.

Argumen lain mengapa strategi pendidikan efektif karena salah satu penyebab utama munculnya perburuhan anak adalah terputusnya akses terhadap layanan pendidikan baik karena biayanya yang tinggi maupun jaraknya yang jauh.³⁴ Penelitian yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2006 menemukan bahwa 71% orang tua yang anaknya putus sekolah menyatakan bahwa alasan utamanya karena tidak mempunyai biaya. Meskipun pemerintah Indonesia mempunyai program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk menggratiskan biaya sekolah, namun dalam prakteknya banyak sekali biaya-biaya yang ditetapkan oleh sekolah seperti biaya pendaftaran, seragam, buku dll yang sering sekali memberatkan orang tua siswa yang pada akhirnya menyebabkan anak mereka putus sekolah dan bekerja.³⁵

Jarak yang jauh juga menjadi alasan tingginya putus sekolah dan pada akhirnya menyebabkan anak bekerja. Jarak yang jauh sering memberatkan orang tua khususnya keluarga miskin untuk membiayai transportasi dan bahkan di beberapa daerah khususnya di daerah pegunungan dan perkebunan (misalnya kopi dan karet) anak-anak

³³ International Labour Organization et al. 2008, *Child labour and education in Bangladesh: evidence and policy Recommendation*, diakses tanggal 3 Oktober 2012, http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Publications/WCMS_107508/lang-en/index.htm

³⁴ Inter-Parliamentary Union & ILO, *Eliminating The Worst* hlm. 26.

³⁵ International Labour Organization 2006, *Indonesia's Youth Labor Market and the Impact of Early School Drop Out and Child Labor*, diakses tanggal 18 September 2012, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_120357/lang-en/index.htm

harus berjalan kaki 1-2 jam untuk ke sekolah. Hal ini menjadikan anak perempuan menjadi tidak aman dan memaksa orang tua mereka untuk tidak memberikan ijin sekolah kepada mereka.

Ketika terjadi persoalan terputusnya akses terhadap pelayanan publik seperti layanan pendidikan, maka solusi yang paling efektif adalah membuat dan memfasilitasi adanya akses terhadap layanan publik seperti layanan pendidikan baik formal maupun non formal. Pesantren dengan program pendidikan agama dan pendidikan formalnya menjadi peluang yang sangat strategis untuk membuka akses terhadap layanan pendidikan tersebut mengingat pesantren tersebar luas sampai ke pelosok-pelosok atau desa-desa. Inilah salah satu alasan mengapa salah satu lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Paramitra Malang, bekerjasama dengan Pesantren Madinatul Ulum di Kabupaten Jember Jawa Timur untuk menghapus perburuhan anak di perkebunan karet dan tembakau karena pesantren tersebut ada di sekitar lokasi perkebunan.³⁶

3. Pesantren, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelopor Problem Solver

Syaba (2004) seperti dikutip oleh Hiroko, mengemukakan ada tiga peran pesantren dalam pembangunan yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan, pesantren sebagai pusat pengembangan kader-kader muslim dan pesantren sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan pesantren dapat terlibat secara aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat.³⁷ Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata 'daya' yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian proses menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi

³⁶ Irwanto dkk, *Alternative Education...* hlm. 79.

³⁷ Horikoshi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987), hlm. 232.

masyarakat yang lemah baik pengetahuan, kebiasaan maupun praktek menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-prilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik. Sedangkan ‘memperoleh daya’ menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Makna kata ‘pemberian’ menunjukkan pada sumber inisiatif bukan dari masyarakat tetapi berasal dari pihak lain yang memiliki kemampuan seperti pemerintah atau agen-agen pembangunan yang lain.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, sumber pengetahuan dan pembaharuan dapat berasal dari dalam maupun dari luar komunitas yang bersangkutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, sumber dari luar sering sekali muncul karena tidak jarang dijumpai suatu komunitas yang membutuhkan peningkatan, tetapi prakarsa dari dalam masyarakat sendiri ternyata tidak kunjung datang. Oleh karena itulah diperlukan intervensi dari luar untuk mendorong tumbuhnya perubahan dan pembaruan tersebut. Namun demikian intervensi yang diberikan perlu diusahakan untuk tidak menimbulkan ketergantungan tetapi justru mendorong kesinambungan.³⁸ Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁹

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan penerahan sumberdaya yang dimiliki oleh internal masyarakat tersebut. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tersebut, intervensi dapat dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pendidikan seperti pesantren.

Pesantren sebagai agen pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru mengingat konsep *dakwah bil hal* melalui pemberdayaan masyarakat telah lama dilakukan oleh pesantren.

³⁸ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 137

³⁹ Sulistyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 79.

Pesantren Maslakhul Huda Pati Jawa Tengah misalnya sejak tahun 1984 bekerjasama dengan P3M Jakarta mengajak 12 pesantren se Jawa Tengah untuk menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

Pemberdayaan masyarakat melalui pesantren adalah strategi yang sangat efektif untuk menghapus perburuhan anak mengingat penyebab utama munculnya pekerja anak adalah karena faktor kemiskinan. Kemiskinan orang tua menyebabkan mereka mendorong anak-anak mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.⁴¹ 77% Pekerja anak di perkebunan tembakau di Kabupaten Jember misalnya mengemukakan alasan bahwa mereka terpaksa bekerja demi untuk membantu ekonomi keluarga.⁴² Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi seperti dijelaskan dalam pembahasan strategi penanganan perburuhan anak diatas menjadi strategi utama dalam upaya penghapusan perburuhan anak dan pesantren sangat dengan kapasitas yang dimilikinya menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk melakukan pemberdayaan ekonomi mengingat bnayak sekali pesantren-pesantren yang berada di kantong-kantong kemiskinan. Pesantren-pesantren tersebut dapat menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat untuk menghapuskan mata rantai kemiskinan dan perburuhan anak.

5. Penghapusan Perburuhan Anak di Perkebunan oleh Pesantren Madinatul Ulum

Program penghapusan pekerja anak yang dilakukan oleh Pesantren Madinatul Ulum⁴³ diinisiasi oleh Yayasan Paramitra

⁴⁰ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm. 3.

⁴¹ Sharma, Kishor, *Labor standarts and WTO rules: survey of the issues with reference to child labour in South Asia*; *Journal of Economic Issues*, 43, 1, 2009, hal. 258, diakses pada tanggal 6 September 2012 dari Proquest Research Library

⁴² International Labour Organization 2007, *child labour on tobacco plantation in jember district*, diakses 18 September 2012, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_116537/lang-en/index.htm

⁴³ Pesantren madinatul Ulum terletak di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Pesantren ini termasuk pesantren paling tua di Kecamatan Jenggawah yang didirikan tahun 1981. Pondok pesantren ini mempunyai misi sosial keagamaan yang sangat kuat sekali sehingga program-program dan kegiatannya mencoba menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat diantaranya adalah menjawab persoalan pekerja anak di perkebunan kopi, karet dan tembakau yang banyak terkonsentrasi di kecamatan Jenggawah.

Malang⁴⁴ dan International labour Organization (ILO) melalui International program on the elimination of child labour (IPEC), TDH Belanda dan GGP Japan sejak tahun 1993 sampai tahun 2000. Adapun program penghapusan perburuhan anak yang dilakukan oleh pesantren madinatul ulum antara lain adalah:⁴⁵

a. Pendidikan Non-Formal

Anak-anak yang bekerja adalah anak-anak yang tidak sekolah. Karena kebutuhan ekonomi dan lemahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadikan anak putus sekolah dan bekerja. Pada awal program dilaksanakan pada tahun 1993, pendidikan paling tinggi yang diselesaikan oleh pekerja anak adalah setingkat SD. Untuk memenuhi hak dasar anak akan pendidikan tersebut, Pesantren Madinatul Ulum memfasilitasi program kejar paket A dan B untuk pekerja anak tersebut.

Dalam melaksanakan program kejar paket tersebut, Pesantren Madinatul Ulum bekerjasama dengan pesantren-pesantren kecil yang ada di sekitar perkebunan, guru-guru ngaji dan tokoh agama dan masyarakat yang merupakan alumni Pesantren Madinatul Ulum serta pemerintah daerah. Kegiatan program kejar paket A dan B pada awal program tahun 1993 tersebar di dua kecamatan yaitu kecamatan Jenggawah dan Tempurejo. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan program paket tersebar ke empat kecamatan yang lain yaitu kecamatan Ajung, Mumbulsari, Jenggawah dan Tempurejo.

b. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Program ini bertujuan untuk membangun kemampuan atau keterampilan dasar anak untuk menunjang tumbuh kembang anak seperti kecakapan untuk mengenali apa yang menjadi hak anak dan bahaya dan resiko menjadi pekerja anak. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan inti untuk meningkatkan kesadaran anak itu sendiri akan hak-hak mereka sebagai anak seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan. Pelatihan ini adalah pintu masuk ke program

⁴⁴ Lembaga Paramitra didirikan pada 24 tanggal 10 Nopember 1986, Berdirinya Lembaga Paramitra dilatarbelakangi adanya tingkat kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat sebagai salah satu dampak politik pembangunan yang berorientasi mengejar pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus menggambarkan keterbatasan ruang akses sumberdaya bagi sebagian besar masyarakat lapis bawah.

⁴⁵ Nazili M & M. Ulil Absor, *Model Penghapusan.....*, hlm. 81-89.

pendidikan yang lain khususnya program kejar paket karena melalui pelatihan KHA ini anak dimotivasi untuk sekolah dan metodologi yang dikembangkan dalam penyampaian materi adalah melalui permainan-permainan yang sangat menyenangkan untuk anak.

c. Pelatihan Keterampilan

Di samping mendapat program kejar paket, anak-anak yang bekerja juga difasilitasi pelatihan keterampilan seperti menjahit, salon, otomotif dll dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan anak sesuai dengan minat dan bakat anak. Keterampilan yang didapat inilah yang nantinya akan menjadi alternatif mata pencaharian yang lebih aman dan menghasilkan jika dibandingkan dengan bekerja sebagai buruh perkebunan yang harus bekerja mulai tengah malam. Pelatihan keterampilan tersebut bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan pekerja anak tetapi melalui pelatihan keterampilan tersebut pekerja anak diperkenalkan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Dalam melaksanakan praktek keterampilan, pekerja anak yang mendapat pelatihan keterampilan dilengkapi dengan standar perlengkapan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga pekerja anak mempunyai gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana mengurangi resiko kerja dengan menggunakan alat-alat perlindungan kerja.

d. Advokasi kepada stakeholder (pemangku kepentingan) terkait

Sasaran advokasi adalah pemerintah daerah, pengelola perusahaan perkebunan, tokoh agama dan masyarakat dan orang tua serta anak. Tujuan advokasi adalah untuk meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan tersebut akan pentingnya pendidikan bagi anak dan larangan mempekerjakan anak.

Ada tiga strategi utama yang dilakukan dalam melakukan advokasi yaitu:

1. Melakukan pertemuan rutin dengan orang tua. Pertemuan rutin tersebut dilaksanakan sekali dalam empat bulan. Melalui pertemuan rutin tersebut penyelenggara program menyampaikan materi KHA dan memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anak mereka. Salah satu alasan tingginya pekerja anak di perkebunan adalah karena kultur masyarakat di sekitar perkebunan yang menganggap pendidikan formal

tidak penting. Mereka berpendapat bahwasanya yang penting adalah pendidikan agama sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah dan hanya mengaji di musholla dan di masukkan di pesantren untuk mempelajari agama. Kultur masyarakat tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pesantren. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan untuk orang tua adalah advokasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak dan larangan mempekerjakan anak.

2. Pelatihan tentang hak anak dan bahaya dan resiko pekerja anak untuk pemerintah dan pengelola perkebunan.
3. Memanfaatkan forum pengajian rutin di tingkat masyarakat untuk menyelipkan materi tentang peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan larangan mempekerjakan anak. Peningkatan kesadaran melalui pengajian ini dilakukan oleh kiai dan ustad-ustad yang menjadi mitra pesantren madinatul ulum.

Dari penjelasan diatas nampak jelas bahwa pendekatan kegiatan yang dilakukan oleh pesantren Madinatul Ulum adalah pendekatan berbasis hak khususnya hak pendidikan. Untuk mendapatkan hak dasar tersebut maka strategi utama yang dilakukan adalah layanan pendidikan yang sudah terbukti efektif dalam upaya-upaya penghapusan perburuhan anak di dunia. Disamping itu, salah satu keunikan dari model ini adalah kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan bahaya serta resiko menjadi pekerja anak dengan memanfaatkan pengajian-pengajian rutin untuk masyarakat. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan jejaring pesantren-pesantren lain.

E. Penutup

Penghapusan perburuhan anak membutuhkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan (stakeholder). Pesantren sebagai lembaga dakwah, pendidikan dan sosial adalah salah satu stakeholder pekerja anak yang dapat berperan strategis dalam penghapusan perburuhan anak di indonesia. Sebagai lembaga dakwah, pesantren mempunyai potensi yang sangat besar dalam upaya-upaya penyadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak dan bahayanya mempekerjakan anak. Pendekatan ini sangat strategis dan relevan mengingat salah satu faktor utama munculnya perburuhan

anak adalah faktor budaya dan kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang bahayanya perburuhan anak. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dapat memberikan layanan pendidikan baik untuk mencegah maupun menarik pekerja anak dari dunia kerjanya. Pembelajaran utama dari program-program penghapusan perburuhan anak di dunia menunjukkan bahwasanya strategi yang paling efektif untuk menghapuskan perburuhan anak adalah melalui pendidikan. Pesantren yang tersebar sampai pelosok-pelosok kantong pekerja anak menjadikan pesantren sangat strategis dalam penghapusan perburuhan anak. Disamping itu sebagai lembaga sosial, pesantren dapat berperan dalam program-program pemberdayaan masyarakat mengingat faktor utama penyebab perburuhan anak adalah karena faktor kemiskinan.

Berdasarkan argumen tersebut maka banyak sekali program-program penghapusan perburuhan anak baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh lembaga non pemerintah bekerjasama dengan pesantren-pesantren. Pesantren Madinatul Ulum di Kabupaten Jember adalah salah satu pesantren yang melakukan aksi-aksi nyata dalam penghapusan pekerja anak di Kabupaten Jember. Pesantren Madinatul Ulum melakukan pendekatan yang holistik melalui program-program peningkatan kesadaran, layanan pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satu hal yang menarik dari model ini disamping layanan pendidikan yang diberikan adalah kampanye pentingnya pendidikan dan berbahayanya perburuhan anak dilakukan melalui pengajian-pengajian rutin yang dilakukan oleh pesantren dan jaringan pesantren lainnya. Model ini bisa menjadi alternatif model yang bisa diterapkan oleh pesantren-pesantren lain yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS & ILO, *Working Children In Indonesia*, Cat. No. 2306003, Jakarta: BPS & ILO, 2009
- Horikoshi, Hiroko, *Kiai dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987
- <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=95270>, diakses tanggal 25 Oktober 2012
- <http://dprd.jatimprov.go.id/index.php?limitstart=27>, diakses tanggal 25 Oktober 2012
- International Labour Organization, *Panduan Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pelaporan Penerima Manfaat Langsung*, Jakarta: Intrnational Labour Office, 2008
- International Labour Organization, *Sikap Terhadap Pekerja Anak Dan Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Intrnational Labour Office, 2006
- International Labour Organization, *Tackling Hazardous Child Labour In Agriculture Guidance On Policy And Practice*, Geneva: Intrnational Labour Office, 2006
- International Labour Organization, *Katalog tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia*, Jakarta: Kantor ILO Jakarta, 2001
- International Labour Organization & Pusat Penelitian Sosial dan Pembangunan, Universitas Atmajaya, *Pemetaan keterlibatan anak dalam Perdagangan Narkoba di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat*, 2005
- International Labour Organization, *Program Terikat Waktu Indonesia tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)*, Jakarta: kantor ILO Jakarta, 2008
- International Labour Organization 2006, *Indonesia's Youth Labor Market and the Impact of Early School Drop Out and Child Labor*, diakses tanggal 18 September 2012, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_120357/lang-en/index.htm
- International Labour Organization 2007, *child labour on tobacco plantation in jember district*, diakses 18 September 2012, http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_116537/lang-en/index.htm

- Inter-Parliamentary Union & ILO, *Eliminating The Worst Forms Of Child Labour: A Practical Guide To ILO Convention No. 182: Handbook For Parliamentarians*, Switzerland: International Labour Office, 2002
- Irwanto dkk, *Alternative Education For Disadvantaged Youth In Indonesia*, Paris: UNESCO, 2001
- Jalaluddin Rahmad, *Rekayasa Sosial*, Bandung: Rosdakarya, 1999
- Keputusan Menteri no 235 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak
- Keputusan Presiden 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)
- Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, *Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak: Periode 2002-2007*, Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 2008
- Lansky Mark, Perspective, Child Labour: How the Challenge Is Being Met, *International Labour Review*; Summer 1997; 136, 2, diakses tanggal 6 September 2012 dari Proquest Research Library
- Nazili M & M. Ulil Absor, *Model Penghapusan Pekerja Anak Di Perkebunan Melalui Layanan Pendidikan Di Pesantren Madinatul Ulum Kabupaten Jember Jawa Timur*, Yogyakarta: laporan penelitian tidak diterbitkan, 2010
- Nellen Haspels & Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan Dan Anak: Panduan Praktis Bagi Organisasi*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005
- Sharma, Kishor, *Labor standarts and WTO rules: survey of the issues with reference to child labour in South Asia*; *Journal of Economic Issues*, 43, 1, 2009, hal. 258, diakses pada tanggal 6 September 2012 dari Proquest Research Library
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum yang Diperbolehkan untuk Bekerja

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

BIODATA PENULIS

Dr. H. Waryono, M.Ag, Ketua Prodi IKS (2009 – 2012) yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini memiliki spesialisasi di bidang Tafsir dan mengampu mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Al Qur'an. Selain mengajar, pegiat gender yang pernah mengikuti *Short Course* Peningkatan Mutu Dosen-dosen PTAI di Melbourne University Australia selama sebulan (2010) ini juga menjabat sebagai Tim Ahli Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Provinsi DIY dan Pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi DIY serta menjadi Pengurus BP4 Kabupaten Sleman. Pernah menulis “Kesejahteraan Sosial (*al-Adhulljtima'i*) dalam Perspektif al-Qur'an” di Jurnal Studi Islam An-Nur pada 2011.

Andayani, MSW, Dosen alumni McGill University, Canada ini memiliki spesialisasi di bidang spiritualitas & pekerjaan sosial dan aktif sebagai advokat isu disabilitas. Sejak 2007 hingga sekarang aktif di Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) sebagai Direktur (2007 – 2011) dan Wakil Direktur. Dalam kepengurusan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), beliau diamanahi sebagai Divisi Advokasi. Mata kuliah yang diampu Advokasi Sosial dan Terapi Kelompok. Beberapa karya tulis beliau *Best Practices, Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif*, dan *Best Practices, Pengorganisasian Kampus Inklusi* yang diterbitkan PSLD UIN Sunan Kalijaga – Pertuni – ICEVI dan

Nippon Foundation pada 2010. Pernah juga menulis artikel tentang “Signifikansi Spiritualitas dalam Praktek Pekerja Sosial” dalam *Antologi Pekerja Sosial* yang diterbitkan oleh IIS Sosial Work Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga pada 2011.

Drs. H. Zainudin, M.Ag, Ketua Prodi IKS sejak 2012 dan pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Ulumul Hadits, dan Kesejahteraan Sosial dalam Sunnah ini merupakan pakar di bidang dialog antaragama sekaligus memiliki spesialisasi di bidang Hadits. Selain menjabat sebagai Direktur LAZIS Fakultas Dakwah juga aktif sebagai Tim Kreatif di *Dialogue Centre* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan sering menjadi fasilitator lokakarya di bidang kerukunan antaragama baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satunya menjadi fasilitator *Dialog Agamawan Muda Lintas Iman* PKBU-Kementerian Agama RI pada tahun 2012. Beberapa karya tulis beliau diantaranya *Etika Dakwah* (2009) dan *Dakwah Rahmatan lil alamin: Kajian tentang Toleransi Beragama dalam Surat al-Kafirun* (2009).

Aryan Torrido, M.Si, Dosen yang rajin mendampingi mahasiswa KKN sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL) ini merupakan alumni Kesejahteraan Sosial Universitas Gadjah Mada dan memiliki spesialisasi di bidang kebijakan kesejahteraan sosial. Selain aktif di Laboratorium Kesejahteraan Sosial dalam bidang pemberdayaan masyarakat, beliau juga menjabat sebagai pengurus Divisi Humas Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI). Beberapa mata kuliah yang diampu Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Gerakan Sosial dan Sosiologi untuk Kesejahteraan Sosial. Pernah menulis *Buku Seri Kebudayaan: Sejarah Selokan Mataram Yogyakarta* yang diterbitkan oleh Indonesian Heritage pada 2010.

Arif Maftuhin, MA, Dosen jebolan University of Washington, USA yang aktif menerjemahkan beberapa buku dan menulis di jurnal dan media massa ini pernah mengikuti *Workshop on Community Development* di McGill University Canada serta beberapa seminar dan workshop internasional. Dosen yang dikenal ahli teknologi informasi ini memiliki spesialisasi di bidang Fiqih dan mengampu mata kuliah Fiqih Sosial. Selain aktif di Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau juga bergabung dalam kepengurusan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI) sebagai Divisi Humas dan Multimedia. Diantara karya yang pernah

ditulisnya *Islam Online: Ormas-ormas Islam di Indonesia di Dunia Maya* (2011)

Abidah Muflihati, M.Si, Ketua Umum PP Nasyi'atul Aisyiyah (2008 – 2012) dan juga Direktur Laboratorium Kesejahteraan Sosial/Labkessos (2007 – 2010) ini mengampu beberapa mata kuliah seperti Pengantar Metodologi Penelitian, Kesejahteraan Sosial dalam Sunnah, Intervensi dengan Individu & Keluarga, dan Kesehatan Mental. Ditengah kesibukannya, beliau kini diamanahi sebagai Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 – sekarang). Pernah menulis artikel “Pekerja Rumah Tangga: Problematika dan Intervensi Sosial” dan “Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Peningkatan Keberfungsian Sosial” dalam buku *Kapita Selekta Pekerjaan Sosial*, diterbitkan oleh Pokja Akademik UIN pada 2008

M. Izzul Haq, M.Sc, Alumni University of London di bidang *social policy* ini aktif dalam Integrated & Sustainable Development (ISD) Institute UIN Sunan Kalijaga sebagai pusat studi di bidang kajian pembangunan terintegrasi dan berkelanjutan. Selain terlibat dalam Laboratorium Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris dan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), beliau juga dipercaya sebagai Kordinator Divisi Multimedia Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD). Beliau mengampu mata kuliah Kebijakan & Perencanaan Sosial dan Perundang-undangan Sosial. Pernah menulis artikel *Menggagas Pengembangan Kesejahteraan Sosial berbasis Pesantren* (2011).

Noorkamilah, M.Si, Sekretaris Prodi IKS sejak 2009 ini merupakan alumni Kesejahteraan Sosial Pascasarjana Universitas Indonesia. Beliau memiliki spesialisasi di bidang nilai dan etika pekerjaan sosial. Mengajar mata kuliah Pengantar Kesejahteraan Sosial dan Nilai Etika Pekerjaan Sosial. Selain aktif sebagai Kordinator Divisi Konseling di Laboratorium Kesejahteraan Sosial, beliau juga menjadi pengurus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Kordinator Divisi Konseling Keluarga. Beberapa karya tulis yang pernah dihasilkan seperti *Kohesivitas Remaja Islam Kampung Sayidan, Prawirodirjan Yogyakarta* (2008) dan *Keberfungsian Sosial Keluarga Komunitas Pemulung di sekitar TPA NgjLGFQablak, Yogyakarta* (2010).

Drs. H. Suisyanto, M.Pd, Pembantu Dekan III Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008 – 2012) ini dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan memiliki spesialisasi di bidang *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Participatory Action Research* (PAR). Dosen yang aktif menjadi anggota Kelompok Tenaga Akademik Kuliah Kerja Nyata (KTA KKN) pada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Sunan Kalijaga serta mendampingi desa binaan di Bantul dan Gunungkidul ini mengajar matakuliah Filsafat Dakwah. Karya peraih Satyalencanakaryasatya XX Tahun dari Presiden RI pada 2006 ini diantaranya *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam* (2007).

Asep Jahidin, M.Si, Dosen yang dikenal aktif ini mengampu beberapa mata kuliah seperti HBSE, Manajemen Diklat, Filantropi Islam dan Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Selain menjadi Sekretaris Prodi Interdisciplinary-Islamic Studies (IIS) – Social Work Pascasarjana UIN Jogja dan aktif di PSLD, beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Wilayah Yogyakarta dan sebagai Pengurus Bidang Jaringan dan Mitra Kerja Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Propinsi DIY. Pernah menulis *Pekerja Sosial di Sekolah* (2009) dan “Pekerja Sosial Profesional dalam Masyarakat Islam Indonesia” dalam *Antologi Pekerjaan Sosial* (2010)

Siti Solechah, M.Si, Dosen yang aktif di Laboratorium Kesejahteraan Sosial/Labkessos sebagai Kordinator Divisi KKL & Praktikum ini juga menjabat sebagai Bendahara Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga (LK3). Beliau memiliki spesialisasi di bidang praktikum pekerjaan sosial dan memiliki warga dampingan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ‘Cangkruk Pintar’ di Caturtunggal Sleman. Salah satu karya tulis beliau berjudul “Problematika Pemberdayaan Anak Jalanan di Bidang Pendidikan” dimuat dalam *Jurnal PMI* (2008).

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd, Dosen mata kuliah Kewirausahaan Sosial ini merupakan Direktur Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD) yang mengelola produksi Siaran TV Sunan Kalijaga, siaran Radio Rasida dan kegiatan fotografis. Dosen alumni Pascasarjana UNY Jurusan Ilmu Pendidikan Luar Sekolah dengan konsentrasi studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) ini

memiliki spesialisasi di bidang kewirausahaan dan aktif dalam LSM Forum Daerah (Forda) yang bergerak di bidang pengembangan usaha kecil menengah. Beberapa karya tulis yang dihasilkan diantaranya *Model Penanganan Pekerja Anak di Perkebunan Melalui Layanan Pendidikan di Pesantren Madinatul Ulum Kabupaten Jember Jawa Timur* (2010); *Evaluasi Program Pelatihan Televisi di PPTD* (2011) dan *Dakwah Majelis Ulama Indonesia dalam Mencegah Aliran Sesat di Indonesia* (Jurnal MUI tahun 2012).

M. Ulil Absor, MA, Dosen yang pernah menjadi *Project Officer* ILO di Jawa Timur (2007 – 2010) dan *Child Protection Officer, Child Fund Aceh*, (2007) ini merupakan alumni *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi *Social Work*. Beliau memiliki spesialisasi di bidang perlindungan anak dan kini sedang melanjutkan studi lanjut di Australia. Direktur Laboratorium Kesejahteraan Sosial/Labkessos (2010 – 2012) ini memiliki dampingan masyarakat pengungsi Merapi di Wukirsari Cangkringan Sleman. Mata kuliah yang diampu Teori Kesejahteraan Sosial, Asesmen dalam Pekerjaan Sosial, dan Pekerjaan Sosial Industri. Karya tulis yang pernah dihasilkan diantaranya *Perlindungan Anak dalam Tanggap Darurat: Perspektif UUPA dan Konvensi Hak Anak* (2011).